

Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Alya Fauzi Zaizafun¹, Wartoyo², Diana Djuwita³

^{1,2,3}IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Indonesia

e-mail korespondensi: alyafauzizaizafun9@gmail.com

Informasi Artikel: Submit: 26-03-2024 | Revisi : 19-04-2024 | Terima : 21-04-2024

Abstrak - Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam rentang waktu penelitian mengalami fluktuasi yang menunjukkan pemerintah masih belum optimal dalam menjalankan beberapa fungsinya, salah satunya pada penerapan kebijakan fiskal daerah yakni terkait manajemen pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara parsial (sendiri) dan secara simultan (bersama) pengaruh variabel penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data *time series* (deret waktu) yang mana didapat dari Badan Pusat Statistik. Adapun teknik analisa yang dipakai yaitu regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian membuktikan bahwasannya secara parsial variabel penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah adanya pengaruh yang signifikan serta positif terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat. Secara bersama (simultan) ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2013-2022. Kemudian untuk hasil determinasi (*R-Square*) diperoleh 94,9% yang artinya berpengaruh kuat dan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh aspek lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pemerintah, Pertumbuhan ekonomi

Abstract - *Economic growth in West Java during the research period experienced fluctuations which showed that the government was still not optimal in carrying out several functions, one of which was the implementation of regional fiscal policy, namely related to the management of government income and expenditure. So, the aim of this research is to analyze partially (alone) and simultaneously (together) the influence of tax revenue variables, general allocation funds and government expenditure on the economic growth of West Java Province in 2013-2022. The research method used is a quantitative method with secondary data in the form of time series data which was obtained from the Central Statistics Agency. The analysis technique used is multiple linear regression with SPSS 26. The results of the research prove that partially the variables of tax revenue, general allocation funds and government expenditure have a significant and positive influence on economic growth calculated from the GDP rate in West Java Province. Together (simultaneously) these three independent variables have a positive and significant effect on economic growth in West Java in 2013-2022. Then the determination results (*R-Square*) obtained 94.9%, which means it has a strong influence and the remaining 5.1% is influenced by other aspects outside this research.*

Keywords : *Regional Taxes, General Allocation Funds, Government Expenditures, Economic Growth*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian menjadi salah satu tolak ukur majunya suatu negara. Hal tersebut terjadi yaitu ketika perekonomian di negara tersebut selalu dalam keadaan yang lebih baik pada setiap periodenya sehingga dapat tercapainya keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi di negara tersebut (Aristina et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional biasanya diukur dalam bentuk PDB (Produk Domestik Bruto) secara total dengan dibagi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai kenaikan keahlian pada kurun waktu tertentu oleh negara dalam menyediakan berbagai ragam produk untuk masyarakat (Ambarwati et al., 2021). Serta pada tingkat pendapatan daerah ataupun provinsi, pertumbuhan ekonominya dapat diukur dalam bentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (Firmansyah et al., 2022).

Banyak faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti laju inflasi, teknologi yang semakin berkembang, sumber daya manusia, konsumsi pada masyarakat, pendapatan dan belanja dalam pemerintahan. Sebagaimana kewenangan negara yakni memiliki tanggungjawab dalam pembuatan kebijakan, yang mana kebijakan-kebijakan yang diambil akan selalu berkesinambungan secara langsung untuk mempengaruhi kegiatan



masyarakat di bidang ekonomi (Siregar, 2021). Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan dalam jangka pendek atau jangka panjang guna terealisasinya laju perekonomian yang membaik suatu negara maupun pada daerah maka dibutuhkan adanya langkah pemerintah melalui kebijakan yang berkaitan dalam hal ini seperti: mengurangi angka pengangguran, mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi serta mempercepat aktivitas perekonomian (Azimi, 2021).

Dalam upaya mewujudkan arah perekonomian agar tumbuh lebih baik, maka pengelolaan anggaran daerah yang diimplementasikan melalui kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah (Ompusunggu et al., 2024). Ketetapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan fiskal tercantum dalam wujud Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) yang mana memiliki 3 faktor penting yang diantaranya yaitu pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan pengeluaran pemerintah. Pada penelitian ini, kebijakan fiskal yang dimaksudkan berfokus pada beberapa variabel yaitu terkait pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan dana alokasi umum yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut perlu dibahas karena ketika pemerintah daerah kurang produktif dalam memajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan memperlambat pembangunan ekonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk produktif dalam mengatur belanja daerah dengan memajemen sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Berikut ini dapat dilihat bagaimana kondisi pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berdasar pada PDRB, penerimaan daerah dari pajak dan dana alokasi umum, serta anggaran pemerintah dalam pengeluarannya selama periode penelitian:

Tabel 1. PDRB, Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Tahun	PDRB (Milyar Rp)	Penerimaan Pajak (Milyar Rp)	Dana Alokasi Umum (Milyar Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)
2013	1.093	11.23	2.712	17.51
2014	1.149	13.75	1.687	20.79
2015	1.207	14.61	1.303	24.64
2016	1.275	15.72	1.248	27.62
2017	1.343	16.48	2.992	24.16
2018	1.419	18.15	3.023	33.11
2019	1.490	19.62	3.212	35.83
2020	1.453	17.03	2.964	38.12
2021	1.507	18.84	3.007	44.61
2022	1.589	19.75	3.015	34.00

Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah, 2023).

Terlihat dalam Tabel 1 diatas selama periode pengkajian ini, perekonomian Jawa Barat melalui tingkat PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dilihat dari lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat menunjukkan terjadinya fluktuasi, laju pertumbuhan PDRB terendah berjalan di tahun 2020 sebesar Rp 1.453 Triliun yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.490 Triliun, dimana kondisi tersebut diakibatkan adanya wabah covid-19 yang mana di tahun tersebut termasuk di Indonesia dan daerah-daerah didalamnya terdampak kemerosotan ekstrem dalam perekonomian. Kondisi perekonomian tersebut juga sepadan dengan terdapatnya fluktuasi perekonomian secara nasional yang dilihat dari PDB selama sepuluh tahun terakhir. Keadaan tersebut memperlihatkan pemerintah masih belum maksimal dalam melaksanakan beberapa fungsinya, salah satunya pada penerapan kebijakan fiskal daerah yakni terkait manajemen pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Berlandaskan dalam teori yakni pada paham Keynes yang menyatakan bahwasannya penerapan kebijakan fiskal yang mana termasuk didalamnya upaya dalam manajemen anggaran dari penerimaan dan untuk pengeluaran pemerintah akan berdampak dalam mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian agar menjadi lebih baik yang mana peranan pemerintah dalam hal inipun begitu penting (Eva et al., 2020).

Melalui Tabel 1, bisa terlihat untuk penerimaan daerah dari pajak, dan dana alokasi umum di Jawa Barat yang mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Pada penerimaan yang berasal dari pajak dari tahun 2013 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2020 jumlah penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya dari Rp.19,62 M menjadi Rp.17.03 M. Adapun untuk penerimaan dari dana alokasi umum, penerimaan paling sedikit di tahun 2016 yakni sebesar Rp.1.245 M dan terbesar di tahun 2019 sebesar Rp.3.212 M yang mana hal ini dikarenakan ketika daerah mempunyai kemampuan fiskal yang relatif besar maka pendistribusian dana alokasi umum yang didapat dari pemerintah pusat lebih kecil dan begitu juga sebaliknya (Hastuti, 2018). Kemudian juga terlihat di Tabel 1, untuk anggaran pemerintah Jawa Barat dalam pengeluarannya juga mengalami fluktuasi yang mana anggran terbesar dikeluarkan dalm sepuluh tahun terakhir yakni di tahun 2021 sebesar Rp.44.61 Triliun, dimana

di tahun tersebut pemerintah daerah berusaha mengalokasikan anggaran belanja untuk penanganan covid dan mendorong perekonomian daerah pasca terdampak wabah.

Sebagaimana terdapat beberapa fenomena terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang sudah dipaparkan di sebelumnya khususnya terkait dalam penerapan kebijakan fiskal daerahnya sehingga penulis berminat untuk melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan daerah dari dana pajak dan dana alokasi umum serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.

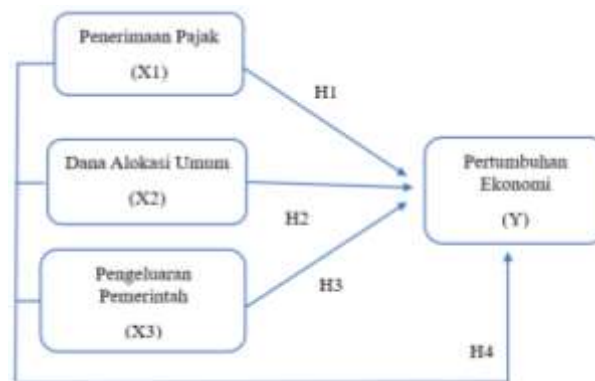
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dalam memantau berhasilnya suatu negara ataupun daerah dalam pembangunannya. Sehingga hal tersebut menarik untuk dibahas dalam berbagai penelitian yang membahas terkait pertumbuhan perekonomian baik dalam skala nasional ataupun daerah-daerah. Adapun bahasan dalam penelitian ini ialah terkait hubungan bagaimana kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, yang mana kebijakan fiskal yang dibahas hanya berfokus pada sisi penerimaan dari pajak provinsi dan dana lokasi umum serta dari sisi pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah dalam upaya mendorong tumbuhnya perekonomian dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam pelaksanaannya (Rambe & Febriani, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian: *Pertama*, penelitian yang membahas tentang adanya hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana terdapat 4 (empat) penelitian yaitu oleh (Yurianto & Akhmad, 2021), (Saragih, 2018), (Idham et al., 2021), dan (Fitria et al., 2023) yang membuktikan adanya pengaruh oleh penerimaan pajak atau pajak daerah yang positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, Ketika penerimaan pajaknya semakin meningkat maka anggaran tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerahnya. Sedangkan dalam penelitian (R. A. Pratama & Widyastuti, 2022) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, penelitian yang membahas tentang adanya hubungan DAU (dana alokasi umum) dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana terdapat 3 (tiga) penelitian diantaranya oleh (AlQomariah et al., 2022), (Sinaga et al., 2020) dan (Istiqamah et al., 2022) yang menyatakan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam pengkajian oleh (Dewi & Suputra, 2017) menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika adanya dana alokasi umum yang kemudian dipakai dengan baik (untuk kebutuhan prioritas) oleh daerah maka dampaknya akan terjadi pula pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Ketiga, penelitian yang membahas tentang adanya hubungan DAU (dana alokasi umum) dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana terdapat 4 (empat) penelitian yaitu oleh (N. Pratama & Utama, 2019), (Millenia & Hasmarini, 2023), (Koilam et al., 2023) dan (Maitulung et al., 2023) yang membuktikan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam output penelitian oleh (Hakib, 2019) yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah adanya pengaruh yang negatif serta tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika semakin meningkatnya pengeluaran oleh pemerintah maka akan berdampak pada naiknya perekonomian.

Kemudian untuk gambaran kerangka pemikiran pada pengkajian ini, dapat dilihat pada gambar 1.:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis yang disusun berdasar pada kerangka berfikir (Sulistiyani & Irawan, 2018). Berdasar kajian pada penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengajukan hipotesis yang diuraikan berikut ini:

- H1: Diduga adanya pengaruh penerimaan pajak (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022 (Y).
- H2: Diduga adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022 (Y).

- H3: Diduga adanya pengaruh pengeluaran pemerintah (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022 (Y).
- H4: Diduga adanya pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yakni sebuah metode dalam penelitian yang memakai data yang berbentuk *numeric* yang mana bersifat statistik sehingga dapat dijadikan instrumen dalam pengujian hipotesis dan penelitian ini memungkinkan adanya generalisasi untuk dianalisis menggunakan statistik (Jailani, 2023). Metode yang dipakai pada pengkajian ini ialah metode deskriptif yang merupakan jenis pengkajian yang mendeskripsikan suatu gejala atau sebuah kejadian yang diperoleh antara satu variabel atau lebih variabel (Adiwisastro et al., 2020).

Teknik dalam pengumpulan data untuk dipakai dalam penelitian ini yakni dengan pendalaman kepustakaan, dokumentasi dan observasi secara tidak langsung yang mana dengan memperoleh data yang sudah jadi di website resmi Badan Pusat Statistik diantaranya data yang diambil yaitu data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilihat dari PDRB berdasar harga konstan (Milyar) tahun 2013-2022, data sumber penerimaan pajak daerah dan data Dana Alokasi Umum (Milyar) serta data realisasi pengeluaran pemerintah Jawa Barat berdasar jenis belanja tahun 2013-2022.

Dikarena data yang diperoleh berbentuk data laporan tahunan BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022, maka untuk memperoleh data triwulan peneliti menggunakan cara interpolasi data dengan menggunakan Eviews 9. Kemudian analisa data yakni dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS 26, yang diantaranya terdiri dari beberapa langkah pengujian: (1) Uji Asumsi Klasik, yang termasuk didalamnya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linieritas; (2) Uji Hipotesis, terdiri dari uji parsial (T), uji simultan (F) dan uji koefisien determinasi; serta (3) Uji regresi linier berganda yaitu dengan persamaan pada penelitian ini:

$$PE = \alpha + \beta_1PP + \beta_2DAU + \beta_3PP + \varepsilon$$

Dengan:

Y	=	Pertumbuhan ekonomi
α	=	konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi x1, x2, x3 terhadap Y
X1	=	Variabel independen ke-1 (penerimaan pajak)
X2	=	Variabel independen ke-2 (dana alokasi umum)
X3	=	Variabel independen ke-3 (Pengeluaran Pemerintah)
ε	=	Nilai residu

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bermanfaat untuk menyatakan data yang dihimpun memiliki distribusi yang normal dan diperoleh dari populasi wajar. Metode klasik pada pengujian normalitas sebuah data tak berbelit (Fahmeyzan et al., 2018). Output pengujian ini terlihat pada Tabel 2, berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	917860.75447346
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.098
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023)

Terlihat pada Tabel 2, yang mendeskripsikan bahwa output dari SPSS 26 menyatakan untuk nilai signifikannya (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya data yang dipakai memiliki distribusi yang normal sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji-uji lainnya.

b) Uji Multikolinieritas

Apabila terjadi keterkaitan linear antara sebagian ataupun seluruh variabel bebas yang tersedia dari suatu model regresi, maka bisa disimpulkan terjadinya gejala multikolinieritas dalam pengujian. Berikut ini output uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10608428.400	1033427.705		10.265	.000		
PenerimaanPajak	45.781	4.086	.757	11.204	.000	.312	3.207
DAU	36.542	9.305	.173	3.927	.000	.730	1.369
PengeluaranPemerintah	2.673	1.279	.138	2.090	.044	.325	3.073

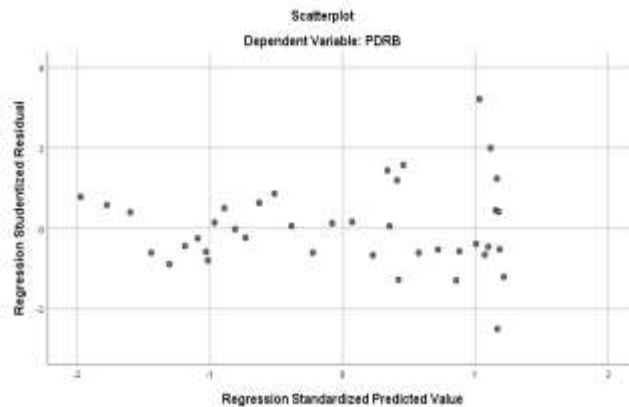
a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Tabel 3 menunjukkan bahwa output dari SPSS 26 menyatakan untuk nilai VIF tidak lebih daripada 10. Untuk nilai VIF pada variabel penerimaan pajak bernilai 3,207, variabel DAU sebesar 1,369 dan variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 3,073 dan ketiga variabel bebas tersebut memperoleh nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1. Hal ini memperlihatkan tidak ada gejala multikolinieritas pada penelitian antara variabel bebasnya.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan agar mengetahui dalam sebuah regresi ini apakah terjadinya ketidaksamaan pada varians dan residualnya. Pengujian pada penelitian ini dengan menganalisis grafik hasil *ScatterPlot* heteroskedastisitas, berikut untuk output pengujiannya:



Gambar 2. Hasil Scatterplot Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Dilihat dari Gambar 2 yang menunjukkan adanya tanda titik-titik pada hasil analisis grafik tersebar dan tidak menyerupai bentuk yang berpola jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Artinya, pada hasil analisis gambar tersebut dapat dinyatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada pengkajian ini yaitu memakai metode Durbin-Watson (DW). Pada penelitian ini, kriteria uji DW digunakan, yaitu ketika nilai Durbin-Watson terdapat di antara -2 sampai +2 maka artinya tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.949	.945	955339.76242	.669

a. Predictors: (Constant), PengeluaranPemerintah, DAU, PenerimaanPajak

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Berdasarkan pada Tabel 4 yang memperlihatkan nilai dari Durbin-Watson yaitu sebesar 0,669 dimana nilai tersebut ada di antara -2 sampai +2 yang kemudian akan dinyatakan bahwa pada data tidak adanya gejala autokorelasi.

e) Uji Linieritas

Uji linearitas diadakan untuk mencari tahu hubungan linear dapat bersifat positif (searah) atau negatif (tidak searah). Berikut output pengujian linieritas dilakukan dengan metode Ramsey:

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.987	.985	492572.63234

a. Predictors: (Constant), DFFIT, PenerimaanPajak, DAU, PengeluaranPemerintah

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Berdasarkan dari perhitungan rumus di atas maka dihasilkan jumlah F hitung (108,153) > F tabel (4,110). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini adalah linier yang bersifat positif (searah).

Analisis Uji Hipotesis

a) Uji T (parsial)

Uji T atau uji tersendiri dipakai dalam menguji ada atau tidak terdapatnya terkaitan variabel independen dengan variabel dependen, menggunakan formula sebagai berikut (Ritongga et al., 2020):

Tabel 6. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10608428.400	1033427.705		10.265	.000
	PenerimaanPajak	45.781	4.086	.757	11.204	.000
	DAU	36.542	9.305	.173	3.927	.000
	PengeluaranPemerintah	2.673	1.279	.138	2.090	.044

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Berdasar pada output pengujian (uji-T) Tabel 6 diatas memperoleh untuk variabel (Penerimaan Pajak) terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai T-hitung sebesar 11,204 yang lebih besar dari nilai T-tabel (1,687), dengan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Artinya, untuk variabel penerimaan pajak terdapatnya pengaruh yang positif serta signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya untuk output pada variabel DAU pada pertumbuhan ekonomi dengan memperoleh nilai T-hitungnya 3,927 yang lebih besar dari T-tabelnya (1,687) serta nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Artinya, dari output tersebut bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian untuk output pada variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai T-hitungnya sebesar 2,090 yang lebih besar dari nilai T-tabel (1,687). Selanjutnya untuk variabel (Pengeluaran Pemerintah) mempunyai nilai

koefisiennya yaitu sebesar 1,279 dan untuk nilai signifikansinya sebesar $0,044 < 0,05$. Artinya, dari perhitungan dalam uji tersebut menyimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah terdapatnya pengaruh yang positif serta signifikan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi.

b) Uji F (simultan)

Pengujian secara bersama-sama ini dipakai sebagai pengukuran pengaruh variabel bebas dengan serentak pada variabel terikat. Adapun langkah yang dipakai yakni dengan mengetahui probabilitas signifikansinya memiliki nilai seberapa besar signifikannya (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	608968915994858.500	3	202989638664952.840	222.412	.000 ^b
	Residual	32856266219500.414	36	912674061652.789		
	Total	641825182214358.900	39			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), PengeluaranPemerintah, DAU, PenerimaanPajak

Sumber: Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Berdasar pada output pengujisn secara simultan di Tabel 7 didapat nilai F hitungnya 222,412 dan F tabel sebesar 2,87 dengan nilai signifikansinya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan jika F hitungnya bernilai lebih daripada F tabel sehingga dikatakan variabel independen (Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluran Pemerintah) secara simultan adanya pengaruh yang signifikan pada variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi).

c) Uji Koefisien Determinan (R-Square)

Uji ini tersebut dipakai sebagai membaca presentase kontribusi pengaruh variabel bebas ataupun independen secara serentak pada variabel dependen (Mardiatmoko, 2020).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.945	955339.76242

a. Predictors: (Constant), PengeluaranPemerintah, DAU, PenerimaanPajak

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (Data Diolah, 2023).

Berdasarkan Tabel 8 Diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square) dari variabel Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah yang tertera pada hasil R Square sebesar 0,949 atau 94,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan besarnya pengaruh terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2022 sebesar 94,9%. Adapun sisanya sebesar 5,1% dideskripsikan oleh variabel lain yang mana tidak termasuk pada pengkajian ini.

Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dipakai dalam penelitian ini sebagai teknik analisis yang tujuannya untuk dapat melihat apakah ada pengaruh yang positif serta signifikan untuk variabel bebas pada variabel terikat. Pada pengkajian ini, pengujian digunakannya analisis regresi linear berganda sebagai langkah untuk dapat mengetahui serta menganalisis pengaruh variabel penerimaan pajak, Dana Alokasi Umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2022. Adapun untuk persamaan dari output analisis regresi linier berganda penelitian ini ialah:

$$Y = 10608428,400 + 45,781 \text{ (Penerimaan Pajak)} + 36,542 \text{ (DAU)} + 2,673 \text{ (Pengeluaran Pemerintah)} + \epsilon$$

Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial yang menunjukkan variabel penerimaan pajak memiliki nilai $T_{hitung} 11,204 > T_{tabel} 1,687$ dan nilai signifikansi variabel Penerimaan Pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 45,781 yang artinya apabila terjadi kenaikan jumlah pada variabel penerimaan pajak sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 45,781%. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat maka dikatakan untuk H1 diterima.

Dari hasil tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya oleh (Saragih, 2018), (Yurianto & Akhmad, 2021), (Fitria et al., 2023) dan (Idham et al., 2021) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh penerimaan dari pajak. Dalam mendukung kemandirian dalam daerah, pemungutan pajak dijalankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap tumbuh stabil.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Sebagaimana hasil pengkajian yang sudah dilakukan dengan parsial (sendiri) yang menunjukkan variabel dana alokasi umum memiliki nilai $T_{hitung} 3,927 > T_{tabel} 1,687$ dan nilai signifikansi variabel DAU sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 36,542 yang artinya apabila terjadi kenaikan jumlah pada variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 36,542%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat maka hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil tersebut sejalan dengan pengkajian yang dilakukan (Datu et al., 2021) dan (Mokoginta et al., 2023) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh penerimaan DAU. Penerimaan daerah dari dana alokasi umum akan didistribusikan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, salah satunya yaitu untuk belanja daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, ketika Dana Alokasi Umum yang didapat oleh pemerintah daerah semakin meningkat maka pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut juga akan meningkat.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial yang menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai $T_{hitung} 2,090 > T_{tabel} 1,687$ dan nilai signifikansi variabel pengeluaran pemerintah sebesar $0,044 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 2,673 yang artinya apabila terjadi kenaikan jumlah pada variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 2,673%. Sehingga disimpulkan, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menstabilkan perekonomian daerahnya.

Sebagaimana sepadan dengan pengkajian oleh (Najmi et al., 2022) dan (Maitulung et al., 2023) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ketika pengeluaran atau belanja pemerintah suatu daerah tersebut dialokasikan guna mendanai kegiatan pembangunan perekonomian daerahnya.

Pengaruh penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, nilai F_{hitung} sebesar 222,412 $> F_{tabel}$ sebesar 2,87 dengan nilai signifikansinya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasannya semua variabel bebas yakni penerimaan pajak, Dana Alokasi Umum dan pengeluaran pemerintah yang mana secara bersama-sama adanya pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.

Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Rambe & Febriani, 2020) dengan belanja pemerintah dan pajak daerah sebagai variabel bebas dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat yang membuktikan bahwasannya secara simultan Belanja Pemerintah dan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta searah dengan output penelitian oleh (Maulana & Susilowati, 2020) yang membuktikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pajak daerah dengan bersama-sama (simultan) variabel tersebut terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Kesimpulan

Berdasar dari output penelitian yang sudah dilaksanakan pada pengujian hipotesis, kemudian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*, adanya pengaruh yang positif serta signifikan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan uji hipotesis secara parsial dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$; *Kedua*, adanya pengaruh yang positif serta signifikan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan uji hipotesis secara parsial dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. *Ketiga*, adanya pengaruh yang positif serta signifikan

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan uji hipotesis secara parsial dengan nilai signifikansinya sebesar $0,044 < 0,05$. Keempat, adanya pengaruh yang signifikan dari Penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan uji hipotesis secara simultan dengan nilai F_{hitung} sebesar $222,412 > F_{tabel}$ sebesar 2,87 dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang mana tidak lebih daripada 0,05.

Berdasar pada output penelitian diatas sebagaimana sudah dipaparkan pada kesimpulan serta bab sebelumnya, sehingga setelahnya peneliti akan memeberikan beberapa saran, yakni Untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran pemerintah maka perlu adanya perencanaan yang matang dari pemerintah dalam menggunakan anggaran pengeluaran daerah serta diharapkan dapat meningkatkan belanja pembangunan agar lebih produktif sehingga dapat menjadi perhatian agar pengeluaran pemerintah bisa memepercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, Penelitian ini tidak meneliti secara khusus terkait jenis pajak daerah yang mana adanya kontribusi tinggi pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak hanya meneliti pada variabel Penerimaan Pajak, DAU dan Pengeluaran Pemerintah saja, akan tetapi diharapkan untuk mengidentifikasi struktur pajak di Provinsi Jawa Barat lebih rinci dan komprehensif serta mencari indikator lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Referensi

- Adiwisastro, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran kesenjangan digital menggunakan metode deskriptif berbasis website. *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 8(2).
- AlQomariah, A. N. R., Pardawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis (JIKAB)*, 1(2), 60–69.
- Ambarwati, A. D., Sara, I. M., & Aziz, I. S. A. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(1), 21–27.
- Aristina, K., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(2), 403–414.
- Azimi, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2020. *Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.29406/jpr.v8i1.3091>
- Datu, I. F., Engka, D. S., & Rorong, I. P. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.33204>
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Eva, D., Silalahi, S., & Kunci, K. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.
- Fahmeyzan, D., Soraya, S., & Etmy, D. (2018). Uji normalitas data omzet bulanan pelaku ekonomi mikro desa seenggigi dengan menggunakan skewness dan kurtosi. *Jurnal Varian*, 2(1), 31–36.
- Firmansyah, H., Anjani, A. N., Nurdianti, D., Miharja, L. N. A. D., Agustina, N., & Hariadi, H. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa barat. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 43–61.
- Fitria, A., Weriantoni, W., Saibah, B. R. A. M., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 46–53.
- Ghozali, H. I. (2018). Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakib, A. (2019). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Hasuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784–799.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).

- Istiqamah, N., Arif, M., Maknun, M., Mapparenta, M., & Awaluddin, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 50–56. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.86>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Koilam, C. T. C., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 25–36.
- Maitulung, A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 145–156.
- Mardiarmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [canarium indicum l.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
- Maulana, F. A., & Susilowati, D. (2020). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pajak Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 130–139. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.9600>
- Millenia, A. P., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Angkatan Kerja dan Human Capital Investment di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 685–690. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.815>
- Mokoginta, A., Engka, D. S., & Maramis, M. T. B. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(3), 284–303.
- Najmi, I., Adi, A. R., & Zulha, A. M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 18–36.
- Ompusunggu, L. D. N., Rajagukguk, T. M., Ambarita, R. E., Sari, D. S., Anggreani, N., Lestari, N. B., Niat, N., Lala, Y., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal: Evaluasi Perubahan Peraturan Pajak Tahun 2021 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalteng. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 158–165. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1464>
- Pratama, N., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020). Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.32663/pareto.v3i1.1362>
- Ritonga, H. M., Pane, D. N., & Rahmah, C. A. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Honda Idk 2 Medan. *JUMANT*, 12(2), 30–44.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40–48.
- Siregar, E. Y. (2021). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 163–175.
- Sulistiyani, H., & Irawan, B. (2018). Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai Di Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 20–26.
- Yurianto, Y., & Akhmad, T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(4), 436–449. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v7i4.9960>